

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdullah, R. (2017). Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 111-118.
- Daniswara, D. (2021). *Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan dalam Masa Pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Banjarbaru*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Halim, A., & Kusufi, M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Hariyanto, A. (2012). Penggunaan Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Dharma Ekonomi*, 1-11.
- Hoesada, J. (2006, Maret 1). Kode Akun Pemerintah Pusat. p. 7.
- Indahsari, D. N. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 10-13.
- Kusuma, I. G. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 10-13.
- Lempas, B. S., Runtu, T., & Pusung, R. J. (2017). Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Restitusi dan Kompensasi Di KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset AKuntansi*, 694-702.
- Maisyarah, R. (2019). Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, & Perpajakan Indonesia*.
- Mardiasmo, P. D. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- McMillan, J., & Schumacher, S. (1997). *Research in Education, a Conceptual Introduction*. New York: Longman.
- Mulyana, B. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*.

- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sartika, E., D., N. A., & S. N., S. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan* 5, 144-159.
- Siyoto, Sandu, & Sodik, A. (2021). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Suryanovi, S., & al, e. (2014). *Buku Seri Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pemerintah Pusat (Buku 2)*. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Syadza, Azizah, H., Gusnawati, Alya, W., & Ardiningrum, L. (2021). Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal Terkait APBN. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara*, 75-82.
- Taukhid, & Sundari, S. R. (2019, November). Kajian Fiskal Regional Triwulan III 2019. Indonesia: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- Utami, A., & Bakri, M. R. (2021). Proses Bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G3) terhadap Penerimaan di Masa Pandemi. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5-7.
- Widianti, H., Hadiyati, S., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrua pada Sektor Pemerintah. *Jurnal SENIT 2016*, 155-162.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan. Jakarta.
- IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018.
- PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 12 Laporan Operasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (n.d.).

C. Website

Petunjuk Teknis Pencatatan Setoran Pajak pada Aplikasi SAKTI. (2020, December 27). Retrieved from kemenkeupedia: <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/9266-petunjuk-teknis-pencatatan-setoran-pajak-pada-aplikasi-sakti>

Rahmattullah. (2019, September 30). *MPN-G3: Sistem Penerimaan Negara Kekinian.* Retrieved from Koran Kaltara: <https://korankaltara.com/mpn-g3-sistem-penerimaan-negara-kekinian/>